

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

2020-2024



Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR: SK. 103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SET.2/KEU.0/9/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SET.2/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/SET-1/2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2020

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

HANIF FALSOL NUROFIQ

NIP 19710321 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Nomor : SK. 103/SET.2/PROEV/KEU.1/11/2020
Tanggal : 4 November 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	12
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	12
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL.....	14
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	18
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL.....	18
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL	18
3.3. Pengarusutamaan	19
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL (<i>Cascading</i>)	21
4.2. Target Kinerja.....	21
4.3. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V. PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	30
Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan.....	30
Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Komponen.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL.....	4
Gambar 1. 2 Analisis SWOT Setditjen PKTL	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	9
Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2019	9
Tabel 4. 1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Setditjen PKTL 2020-2024.....	21
Tabel 4. 2. Target Kinerja Program sesuai tupoksi Setditjen PKTL 2020-2024.....	22
Tabel 4. 3. Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Setditjen PKTL Tahun 2020-2024	22
Tabel 4. 4. Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.....	23
Tabel 4. 5. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Setditjen PKTL 2020-2024..	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Setditjen PKTL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024.

Proses penyusunan Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 diawali dengan diskusi yang melibatkan seluruh unsur lingkup Setditjen PKTL yang bersinergi dengan penyusunan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024. Mengingat isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional, maka memungkinkan dalam tahap selanjutnya Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 serta Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 mengalami penyesuaian.

Setditjen PKTL berperan dalam sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi, dan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

Dengan tersusunnya Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berfokus terhadap tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung terwujudnya visi Ditjen PKTL, yaitu : "Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP
NIP 19710321 199302 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024 (Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024) diawali dengan penjelasan kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Setditjen PKTL, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019 dijabarkan sebagai masukan terhadap identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.1 Kondisi Umum

Setditjen PKTL merupakan bagian dari Ditjen PKTL, dan mempunyai peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Tugas Setditjen PKTL sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKTL. Adapun fungsi Setditjen PKTL adalah menyelenggarakan:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PKTL terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. **Bagian Program dan Evaluasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; (b) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan (c) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan. Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
 - b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
2. **Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; (b) pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan (c) penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
 - b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
 - c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.
3. **Bagian Keuangan dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Sedangkan fungsi dari Bagian Keuangan dan Umum yaitu menyelenggarakan : (a) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; (b) pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan (c) pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
 - b. Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebhendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

- c. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

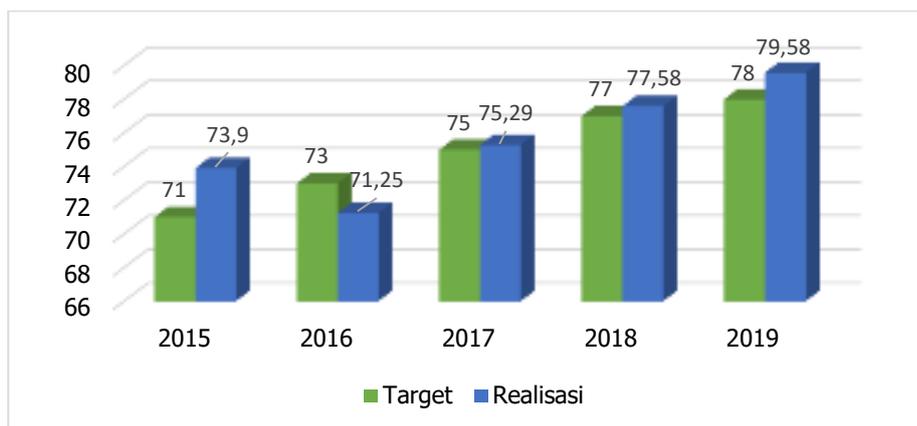
4. **Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta persiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: (a) persiapan bahan peraturan perundang-undangan; (b) persiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan (c) persiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka persiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka persiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran kegiatan guna mendukung dan memastikan tercapainya sasaran program Ditjen PKTL. Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024 adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bagian lingkup Setditjen PKTL sampai dengan tahun 2024.

1.1.1. Kondisi Pembangunan dan Peran Setditjen PKTL

Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 79,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini menunjukkan Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2019 sudah mencapai target 2020 sehubungan penentuan target tahun 2020 dalam aplikasi Krisna dilaksanakan sebelum Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019. Pencermatan terhadap target Nilai SAKIP Ditjen PKTL akan dilaksanakan sejalan dengan Perubahan Renstra Ditjen PKTL dan Renstra Setditjen PKTL Tahun 2020-2024. Target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL
Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PKTL (2019)

Hasil pelaksanaan kegiatan Setditjen PKTL sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015-2019

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
Penyusunan rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan	Buku Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan	Buku LAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku LAKIP Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	190 Judul	190 Judul	100%
	Laporan evaluasi Renja Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan evaluasi penetapan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100%
	Laporan monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Evaluasi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	2 Judul	1 Judul	50%
				(Laporan Evaluasi Renstra Tahun 2009-2014)

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
				dilaksanakan pada tahun 2015)
	Laporan Monev Inpres	1 Judul	1 Judul	100%
	Laporan Monev Kegiatan Prioritas Nasional/KL/ Bidang	3 Judul	1 Judul	33%
	Laporan Kajian Pembangunan Planologi kehutanan	3 Judul	3 Judul	100%
	Laporan Identifikasi Responsif Gender	3 Judul	3 Judul	100%
Penyusunan data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan	Laporan data dan informasi kegiatan bidang planologi kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penyusunan Nama-Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Ditjen Planologi Kehutanan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen permasalahan dan penyelesaian kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Dokumen Sistem Informasi Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pemberdayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Pengelolaan Data Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan	21 Draft	44 Draft	209%
	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan	60 Lokasi	63 Lokasi	105%

Unit Kegiatan	Output	Target 2015-2019	Realisasi 2015-2019	Persentase
Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Laporan Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan	5 Laporan	5 Laporan	100%
Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan	Laporan Pengembangan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Pemantauan Hasil Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang planologi	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Barang Milik Negara	Laporan UAKPB Es. II Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan UAKPB Es. I Semester II dan Tahunan	5 Judul	5 Judul	100%
Penyusunan Laporan keuangan	Laporan Keuangan Semester I	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Keuangan Tahunan (Un Audited)	5 Judul	5 Judul	100%
	Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	5 Judul	5 Judul	100%
Pelaksanaan SPI	Laporan Pelaksanaan Monitoring SPI	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan Sosialisasi SPI	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
Penyusunan TL-LHP	Laporan Pelaksanaan TL-LHP	5 Laporan	5 Laporan	125%
Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker	Laporan penyegaran ketatausahaan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%
	Laporan penyegaran SDM Kearsipan/Petugas SIK lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	22 BPKH dan 6 Satker Pusat	100%

Sumber: Diolah dari data LKJ Setditjen PKTL dan Konfirmasi Bagian lingkup Setditjen PKTL (2019)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Setditjen PKTL secara khusus yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Setditjen PKTL pada masa mendatang. Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Setditjen PKTL 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi regulasi, sumber daya manusia, anggaran dan teknologi dan kemitraan, sebagai berikut:

1) Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pengendalian Dampak Lingkungan serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan.

2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

3) Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pengendalian Dampak Lingkungan serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

Potensi yang dimiliki Setditjen PKTL dalam pencapaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83 (A) di tahun 2024, adalah adanya sumber daya manusia yang cukup dan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.

1. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Setditjen PKTL, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis *strength-weakness-opportunities-threat* (SWOT) untuk mendapatkan alternatif Strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.2:

Kekuatan: <ul style="list-style-type: none">• Jumlah pegawai yang memadai (144 orang)• Dukungan anggaran per tahun rata-rata 70 - 80 Milyar• Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai• Eksistensi organisasi baru Ditjen PKTL• Upaya penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu	Kelemahan: <ul style="list-style-type: none">• Kinerja pelayanan publik belum optimal• Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL masih dalam proses pematapan• Koordinasi antar unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum berjalan secara optimal• Lemahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan
Peluang: <ul style="list-style-type: none">• Kerjasama dengan para pihak lain terbuka luas• Adanya dukungan positif dari Dirjen dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PKTL serta Kepala BPKH	Tantangan/Ancaman: <ul style="list-style-type: none">• Tuntutan <i>Stakeholder</i> akan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan• Tantangan Kerja dampak pandemi Covid-19• Moratorium penerimaan pegawai (ASN)• Penganggaran yang masih bersifat tahunan

Gambar 1. 2 Analisis SWOT Setditjen PKTL

Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 1.2, secara Umum Setditjen PKTL dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Setditjen PKTL dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Dtjen PKTL.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam arah kebijakan dan strategi. Potensi Setditjen PKTL dalam mencapai faktor kunci tersebut perlu diidentifikasi dalam mencapai faktor kunci keberhasilan tersebut.

2. Identifikasi Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Jumlah pegawai (PNS dan PPNPN) di lingkup Setditjen PKTL berjumlah 144 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2019 dijabarkan dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Unit Kerja	Tahun 2019										
	Golongan (orang)				Tingkat Pendidikan (orang)						
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	11	56	4	1	-	19	34	6	1	1	1

Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Setditjen PKTL Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2019

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Σ(Jumlah)
Pranata Komputer		
Terampil	1	5
Calon Terampil	0	
Ahli	4	
Calon Ahli	0	
Analisis Kepegawaian		
Ahli	1	4
Calon Ahli	3	
Arsiparis		
Ahli	1	3
Terampil	2	
Pranata Humas		
Ahli	0	1
Calon Ahli	1	
Perancang Peraturan Perundang-undangan		
Ahli	0	1
Calon Ahli	1	

3. Identifikasi Permasalahan Ditjen PKTL

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Setditjen PKTL adalah Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK. Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Ditjen PKTL adalah:

- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin). Setditjen PKTL senantiasa berperan aktif dan memberi perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum. Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Ditjen PKTL. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan *e-government* secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK.
- c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal. Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan sistem manajemen SDM lingkup Ditjen PKTL melalui: (1) Analisis Beban Kerja yang tepat dan sesuai fungsinya; (2) Prosedur Kerja guna menggambarkan profesionalitas; (3) Perencanaan SDM didasarkan pada analisis Beban Kerja tiap jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung tugas dan fungsi; (4) Pengembangan SDM berdasarkan ketimpangan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan Non Formal (Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi), serta informal (pengalaman / *experience*).
- d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.
- e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.

Seluruh satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai 3,217 (terdefinisi). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran

sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (3) tim peningkatan maturitas SPIP dengan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing unit lingkup Ditjen PKTL; (4) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).

- f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal.

Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Ditjen PKTL ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario perubahan tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Ditjen PKTL terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional. Peranan Ditjen PKTL dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program yang ditargetkan dapat menjawab tantangan bangsa ke depan yang semakin besar.

4. Isu Strategis Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu strategis yang dihadapi oleh Ditjen PKTL yaitu: Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

5. Sistematis Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Pendahuluan meliputi Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 meliputi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK dan Ditjen PKTL;
- 3) Kegiatan dan Komponen Kegiatan meliputi kegiatan, sasaran kegiatan, output dan komponen kegiatan Setditjen PKTL;
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, meliputi: Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- 5) Penutup.

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan

dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;

3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sejalan dengan Renstra KLHK 2020-2024, Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup dan (3) Program Dukungan Manajemen. Adapun cakupan sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PKTL, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program serta indikator kinerja Program (IKP) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan adalah:

- 1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual dengan indikator program: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, target kumulatif 37 juta ha). Sasaran program ini mencakup pelaksanaan implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*) serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN;
- 2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dengan indikator program: Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola (target di 34 provinsi);
- 3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator program: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target kumulatif 1.500 pemohon);

- 4) Terelesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan indikator program: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar (target kumulatif 2,53 Juta ha);
- 5) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dengan indikator program: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target di 34 Provinsi).

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah: Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dengan indikator program (1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (target kumulatif 1500 KLHS). Indikator ini mencakup *policy brief* untuk konsep *forest city* dalam rangka perencanaan IKN dan (2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL (target kumulatif 15 laporan). Masing-masing indikator mendukung terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).

3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Dtijen PKTL (target nilai SAKIP 83 poin).

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL

Sesuai dengan tugas dan fungsi Setditjen PKTL, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran kegiatan **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dijabarkan lebih lanjut ke dalam 10 (sepuluh) komponen kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran dengan sasaran tersusunnya dokumen program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan sasaran terselenggaranya pemantauan dan evaluasi;
3. Pengelolaan data dan informasi dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan data dan informasi;
4. Pengelolaan keuangan dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan keuangan;
5. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal dengan sasaran terselenggaranya pelayanan hukum dan kepatuhan internal;
6. Pengelolaan kepegawaian dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan kepegawaian;
7. Pelayanan umum dan perlengkapan dengan sasaran terselenggaranya layanan umum dan perlengkapan;
8. Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi dengan sasaran terselenggaranya;
9. Gaji dan Tunjangan dengan sasaran terselenggaranya layanan penggajian dan tunjangan;
10. Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan sasaran terselenggaranya layanan operasional dan pemeliharaan kantor.

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra Setditjen PKTL 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Setditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan

PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Setditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH dan telah ditanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukannya sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Setditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Setditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya peran secara tidak langsung dengan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bersama Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) selaku Unit Kliring JIG KLHK, Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK serta walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Ditjen PKTL (*Cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Setditjen PKTL dalam rangka mencapai Sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Setditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) Setditjen PKTL 2020-2024 disajikan pada tabel 4.1. Sesuai dengan penjabaran tabel, Setditjen PKTL berperan aktif dalam mewujudkan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Tabel 4. 1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Setditjen PKTL 2020-2024

IKU/ IKP	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen	Satuan Target	
IKU: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi IKP: Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Nilai SAKIP Ditjen PKTL Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Poin	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	Dokumen	
				Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	
				Pengelolaan data dan informasi	Dokumen	
				Pengelolaan keuangan	Dokumen	
				Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Dokumen	
				Pengelolaan kepegawaian	Dokumen	
	Poin	Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	Level	Pelayanan umum dan perlengkapan	Dokumen
				Level	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	Dokumen
				Dokumen	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit
				Dokumen	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Unit
				Dokumen	Gaji dan Tunjangan	Layanan
				Dokumen	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Setditjen PKTL. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.

4.2.1. Target Kinerja Program

Target kinerja program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program. Target Kinerja Program sesuai tupoksi Setditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Target Kinerja Program sesuai tupoksi Setditjen PKTL 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

4.2.2. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi Setditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Setditjen PKTL Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Perbaikan tata kelola pemerintahan Ditjen PKTL yang ditunjukkan dengan nilai reformasi birokrasi minimal 90,00 di tahun 2024 dan SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024. Secara lengkap indikator kinerja kegiatan tersebut dijabarkan dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 4. Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen Kegiatan	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Nilai SAKIP Ditjen PKTL Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Poin Level Dokumen	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Koordinasi Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait	Terkoordinasinya Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait	Laporan Koordinasi Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait
					Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan monev pelaksanaan kegiatan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen Kegiatan	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
					Evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan evaluasi Renja dan Progres Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Monev Pelaksanaan Rencana Aksi	Tersusunnya Laporan Monev Rencana Aksi	Laporan Monev Rencana Aksi
					Pelaksanaan SPIP	Terlaksanakannya SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah	Laporan Pelaksanaan SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah
				Pengelolaan data dan informasi	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Data Informasi dan Kehumasan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Data Informasi dan Kehumasan kegiatan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Pengelolaan kepegawaian	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian/Pengurusan Umum	Terkelolanya dan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian/Pengurusan Umum	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
					Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen pelaksanaan Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Terselenggaranya Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Laporan Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
					Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen Kegiatan	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
					Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional	Terkelolanya Jabatan Fungsional	Laporan Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional
					Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Pelayanan umum dan perlengkapan	Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Terselenggaranya Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	Laporan Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker
					Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Laporan Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan
					Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	Terkelolanya dan Tertatanya Kearsipan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengelolaan dan Penataan Kearsipan
					Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Terfasilitasinya Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan	Laporan Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan
					Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	Laporan Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif
					Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkelolanya Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN, Hibah, Penghapusan, Proses Penetapan HDNo
					Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan (Wasdal)
					Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatkan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Peningkatan kualitas SDM bidang Pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penyusunan Laporan UAKPB Es. II Semester I	Tersusunnya Laporan UAKPB Es. II Semester I	Laporan UAKPB Es. II Semester I
					Penyusunan Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	Tersusunnya Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan	Laporan UAKPB Semester II dan Tahunan

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen Kegiatan	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
					Penyusunan Laporan UAPPB Es. I Semester I	Tersusunnya Laporan UAPPB Es. I Semester I	Laporan UAPPB Es. I Semester I
					Penyusunan Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan	Tersusunnya Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan	Laporan UAPPB Es. I Semester II dan Tahunan
				Pengelolaan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terkendalinya Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Bimbingan Teknis Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Terimplementasinya Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Laporan Keuangan Berbasis Akrual
					Tata Kelola Administrasi Keuangan	Tertata dan Terkelolanya Administrasi Keuangan	Laporan Tata Kelola Administrasi Keuangan
					Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Terlaksananya Penelaahan dan Terpantaunya Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP
					Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Terkoordinasinya Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Penelaahan Tindak Lanjut LHP
					Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Penyempurnaan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		Menyempurnakan Analisis Jabatan	Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan
				Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		Menyempurnakan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen Kegiatan	Rincian Komponen Kegiatan	Sasaran Rincian Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Komponen Kegiatan (IKE)
				Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	indikator Draft peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Penanganan dan Penyelesaian permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Menangani dan menyelesaikan permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan KH Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Mengembangkan dan Memantau Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Workshop Penyusunan Proposal HLN	Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal HLN	Laporan Workshop Penyusunan Proposal HLN
					Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersosialisasikannya Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
					Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Asistensi Tata Cara Penyusunan Proposal HLN dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Gaji dan Tunjangan	Penyelenggaraan Layanan Penggajian dan Tunjangan	Terselenggaranya Layanan Penggajian dan Tunjangan	Laporan Penyelenggaraan Layanan Penggajian dan Tunjangan
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Dokumen Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan Mesin, Kendaraan Dinas dan Layanan Pengadaan

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Setditjen PKTL yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Setditjen PKTL tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya ditujukan untuk belanja operasional dan belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Setditjen PKTL terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Setditjen PKTL 2020-2024 sebesar Rp 409.281.570.000 (empat ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Setditjen PKTL 2020-2024

No.	Komponen	Total 2020-2024 (Rp. Ribu)
1	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	26.551.903
2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	4.479.645
3	Pengelolaan data dan informasi	6.869.112
4	Pengelolaan keuangan	5.419.663
5	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	10.434.529
6	Pengelolaan kepegawaian	7.417.892
7	Pelayanan umum dan perlengkapan	12.587.774
8	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	2.398.417
9	Gaji dan Tunjangan	310.820.366
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	22.302.266
	Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024 *)	409.281.569

Keterangan :

*) Rincian alokasi belanja setiap program pembangunan KLHK di atas disajikan pada lampiran matriks rencana strategis KLHK Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Setditjen PKTL) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup Setditjen PKTL untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Renstra Setditjen PKTL 2020-2024 memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan lingkup Setditjen PKTL serta berperan dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dan mendukung terwujudnya visi Ditjen PKTL, yaitu : "Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Renstra Setditjen PKTL merupakan instrumen dalam mencapai sasaran program Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 yang diamanatkan di dalam lingkungan Setditjen PKTL. Dengan demikian, Renstra ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan capaian akhir yang hendak dituju adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Setditjen PKTL berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah (UPT), dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Setditjen PKTL untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Hanif Falsol Nurfiq, S.Hut, MP
NIP 19710321 199302 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

K/L Program Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	IKU: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	77	79	81	83	85					
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303
Program Dukungan Manajemen									69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	IKP8 : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303
Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan													
Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303
	Sasaran Kegiatan: 01 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	IKK1: Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303
		IKK2: Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4					
		IKK3: Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1					

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Komponen

Indikator Kinerja Program	Satuan target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target	Komponen	Satuan Target	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					Total
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	5.127.805	5.237.009	5.315.564	5.395.298	5.476.227	26.551.903
				Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	891.555	877.090	890.246	903.600	917.154	4.479.645
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	Pengelolaan data dan informasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1.139.037	1.400.687	1.421.697	1.443.023	1.464.668	6.869.112
				Pengelolaan keuangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1.082.250	1.060.258	1.076.162	1.092.304	1.108.689	5.419.663
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Dokumen	1	1	1	1	1	2.088.931	2.040.038	2.070.639	2.101.698	2.133.224	10.434.529
				Pengelolaan kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1.481.676	1.451.077	1.472.843	1.494.936	1.517.360	7.417.892
				Pelayanan umum dan perlengkapan	Dokumen	1	1	1	1	1	2.514.068	2.462.465	2.499.402	2.536.893	2.574.946	12.587.774
				Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	477.787	469.488	476.530	483.678	490.933	2.398.417
				Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	50.911.593	56.002.752	61.603.028	67.763.330	74.539.663	310.820.366
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	3.653.055	4.018.361	4.420.197	4.862.216	5.348.438	22.302.266
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											69.367.757	75.019.225	81.246.308	88.076.976	95.571.303	409.281.569



**Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp.021-5730289 | Email: paplanologi@gmail.com**